

BAB II

BHAYANGKARI SEBAGAI SALAH SATU WADAH PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN SEKITAR

A. Pengantar

Sejak Tahun 1978 memberikan perhatian yang khusus bagi “Peranan Wanita” dalam pembangunan. Bahwasanya pembangunan nasional adalah urusan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya urusan pemerintah saja, bukan hanya urusan aum ahli saja, tetapi unsur swasta, bahkan siapa saja yang merasa mampu apakah itu laki-laki ataupun wanita, semua wajib ikut serta di dalam proses pembangunan tersebut. Baik itu lingkup pemerintahan, pendidikan, maupun organisasi formal maupun informal.

Dengan adanya penelitian ini yang mengangkat objeknya wanita sebagai salah satu dibalik layar terciptanya pembangunan secara formal maupun informal. Maka, dengan diikuti sertakannya kaum wanita dalam segala kegiatan akan menambah kekuatan serta kemampuan di dalam melaksanakan pembangunan sehingga lebih banyak lagi hasil-hasil yang akan dicapai, dengan demikian meningkatkan ketahanan nasional. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup makro tetapi juga mikro.

Bab ini akan dijabarkannya sedikit banyak tentang organisasi Bhayangkari, sebagai organisasi informal dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Organisasi

Informal itu sendiri adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari.

B. Konteks Historis¹ Bhayangkari

Bhayangkari merupakan organisasi istri Polri yang lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta, dan sebagai ketua pengurus besar dijabat oleh Ny. T. Memet Tanumidjaya.

Pada tanggal 19 Oktober 1952, dilaksanakan konferensi istri polisi yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah, dimana telah diputuskan untuk bersatu dalam gerak perjuangan melalui wadah tunggal organisasi persatuan istri Polri Bhayangkari dan tanggal tersebut ditetapkan pula sebagai Hari Anak-Anak Kepolisian.

Berselang empat tahun diadakan kongres kedua pada tanggal 25 Desember 1956, telah disahkan Cupu Manik Astagina sebagai lambang Bhayangkari. Kongres ketiga dilaksanakan tahun 1959, pada kesempatan tersebut disahkan Himne Bhayangkari gubahan Raj. Sudjasmin dengan syair oleh Ny. SA. Legowo. Kongres kelima tahun 1963 menetapkan bahwa tanggal 19 Oktober 1952 merupakan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari.

Pada tanggal 15 April 1964 istri ketiga angkatan dan Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang di sebut Dharma Pertiwi, dimana pada waktu itu terpilih

¹ http://polresmerangin.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1322&Itemid=757

sebagai ketua adalah Ny. B. Soewito dari Bhayangkari, sedangkan Mars Bhayangkari disahkan pada rapat kerja dewan pimpinan Bhayangkari pada tahun 1970 di Jakarta. Sesuai kebijaksanaan pimpinan Hankam tentang organisasi ABRI tahun 1971 terjadi perubahan corak kepemimpinan dari tidak fungsional menjadi fungsional, Ketua Umum Bhayangkari pertama yang secara fungsional dijabat oleh Ny. Muhammad Hasan.

Tahun 1974 pada Musyawarah pusat Bhayangkari IX, sebutan persatuan potensi wanita polri Bhayangkari berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri Bhayangkari dan merupakan organisasi ekstra struktural yang berada dibawah pembinaan Polri.

Bhayangkari dari tahun ke tahun terus berkembang dalam menjalankan roda organisasinya yang selalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membantu tugas-tugas Polri. Dan dengan adanya reformasi pergantian kepemimpinan nasional tahun 1998, Polri pun ikut mereformasi diri, serta adanya tuntutan dari rakyat agar Polri pisah dari ABRI berdasarkan instruksi dari Presiden No. 2 tahun 1999 dan sementara dibawah Menhankam.

Pada tanggal 22 Juni 1999 diadakan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi IX, pada Munas itu secara resmi Bhayangkari pisah dari Organisasi Induk Dharma Pertiwi.

Setelah melalui proses kemandirian Polri, maka pada tanggal 1 juli 2000, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia, dan Bhayangkari pun lansung dibawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya tuntutan reformasi,guna ditegakkannya supremasi hukum dan Polri Mandiri, maka pada tanggal 25 april 2001 dengan keluarnya Kepres No. 54 tahun 2001 dimana jabatan Waka Polri ditiadakan, dan berubah menjadi Sekjen Polri kemudian pada tanggal 21 Juni 2001 keluar kembali Kepres No. 77 tahun 2001 tentang diadakan kembali jabatan Waka Polri, namun tidak berjalan lama dan mengalami perubahan lagi,sehingga keluar pula Kepres No. 97 tahun 2001 tentang pencabutan kembali stuktur jabatan Waka Polri. Karena adanya tuntutan kepentingan tugas, dengan Kepres No. 70/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diadakan validasi Polri.

Hal ini tentunya mempengaruhi struktur Organisasi Bhayangkari, sehingga untuk kepengurusan di Pengurus Pusat Bhayangkari menghapus jabatan Ketua Harian Bhayangkari dan membentuk sekaligus mengangkat Wakil Ketua Umum Bhayangkari.

Dari tahun ke tahun Bhayangkari selalu meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi yang sejalan dengan kemajuan jaman dimana langkah dan kiprah Bhayangkari selalu mencerminkan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan tekad yang tulus untuk menjadi suri tauladan dan panutan bagi keluarga dan masyarakat.

Validasi, likuidasi pada tubuh Polri mewarnai pula keberadaan organisasi Bhayangkari, sehingga sampai saat ini Pengurus Pusat Bhayangkari yang semula membawahi 6 Pengurus Gabungan, 26 Pengurus Daerah dan 2 Pengurus Cabang BS, menjadi membawahi 3 Pengurus Gabungan, 6 Pengurus Cabang BS, 31 Pengurus Daerah, 21 Pengurus Wilayah dan 494 Pengurus Cabang, terdiri dari PC Berdaerah tanggung jawab 414, PC Tak Berdaerah tanggung jawab 80, Jumlah Anggota Biasa 226.957 orang, Jumlah Anggota Luar Biasa : 64.487 orang, Jumlah Pos KB Kes Terpadu : 507 buah, Jumlah Pok BKB : 642 buah.

Disamping itu Bhayangkari memiliki yayasan yang bernama Yayasan Kemala Bhayangkari. Didalam usaha penggalan dana Yayasan Kemala Bhayangkari mempunyai : PT Permata Kemala Bhakti : Mengolah Ruang Pertemuan Kemala. Mengelola Wisma Puri kemala. Mengelola ruang pertemuan Astagina.

Dibidang pendidikan Yayasan Kemala Bhayangkari mengelola sekolah Bhayangkari, antara lain :

Table 2.1**Data Bidang Pendidikan yang Dikelola Bhayangkari**

Jenis Pendidikan	Banyaknya Unit
TK	516 Buah
SD	27 Buah
SMP	19 Buah
SMU	10 Buah
SMK	4 Buah
SLB	4 Buah
PAUD	37 Buah

Sumber : Data Bhayangkari Pusat, tahun 2011

Dibidang sosial Yayasan Kemala Bhayangkari mengelola :

Table 2.1.2**Kegiatan di Bidang Sosial**

Jenis Kegiatan	Banyaknya Unit
PSAA (Panti Sosial Asuhan Anak)	1 Buah
Rumah Bersalin	2 Buah
PT Permata Kemala Bhakti	1 Buah

Sumber : Data Bhayangkari Pusat, tahun 2011

Pada tanggal 1 April 1999 Polri pisah dari ABRI berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 02 tahun 1999 dan untuk sementara dibawah MENHANKAM, maka pada tanggal 22 Juni 1999 tepatnya pada Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi IX, pada Munas itu secara resmi Bhayangkari pisah dari organisasi induk Dharma Pertiwi.

Setelah melalui proses kemandirian Polri, maka pada tanggal 1 Juli 2000, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia, dan Bhayangkari pun langsung dibawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai organisasi besar, Bhayangkari telah memberikan tanda penghargaan kepada pemrakarsa dan pendiri Bhayangkari : Tanggal 15 Oktober 1980, diberikan penghargaan Medali Kemala kepada ibu HL Soekanto Atmodjo, ibu Memet Tanumidjaya dan ibu Soewondo Pranoto.

Tahun 1983 diberikan tanda penghargaan Medali Melati kepada pahlawan Bhayangkari yaitu ibu Sutijah Tjasmadi, ibu Partijah Ngasiman dari Temanggung Jawa Tengah dan ibu Mathilda Batlayeri dari Kalimantan Selatan. Pada tahun 2004 diberikan Medali Melati kepada almarhumah Ny. M Wahyudi selaku mantan Ketua Umum Bhayangkari yang tidak fungsional, dan telah memberikan darma baktinya untuk kemajuan dan perkembangan organisasi Bhayangkari.

C. Kepengurusan Bhayangkari

Organisasi Bhayangkari adalah organisasi kemasyarakatan dan merupakan organisasi ekstra structural POLRI yang berada di bawah pembinaan dan tanggung jawab POLRI. Dengan tujuan membantu dan menyukseskan tugas POLRI dalam menjalankan misinya sebagai alat negara gakkum, pembimbing, pelindung dan pelayanan masyarakat; membantu POLRI dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan POLRI; dan tujuan terakhir meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keanggotaannya Bhayangkari terdapat tiga tipe keanggotaan yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Anggota biasa itu didefinisikan untuk para istri-istri para anggota POLRI tanpa jabatan apapun di lingkungan POLRI. Anggota luar biasa, diperuntukkan bagi para istri-istri POLRI yang merupakan anggota Kepolisian Wanita (POLWAN).

Karena pada umumnya setiap organisasi maupun instansi baik itu formal maupun informal memiliki kewajiban yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya. Begitu menjadi anggota Bhayangkari memiliki kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggotanya, baik itu anggota biasa, anggota luar biasa maupun anggota tamu kehormatan. Kewajiban yang harus di patuhi oleh setiap anggota Bhayangkari adalah Memiliki KTA² dan KPI³, Menjunjung tinggi nama baik organisasi Bhayangkari,

² KTA singkatan dari Katu Tanda Anggota

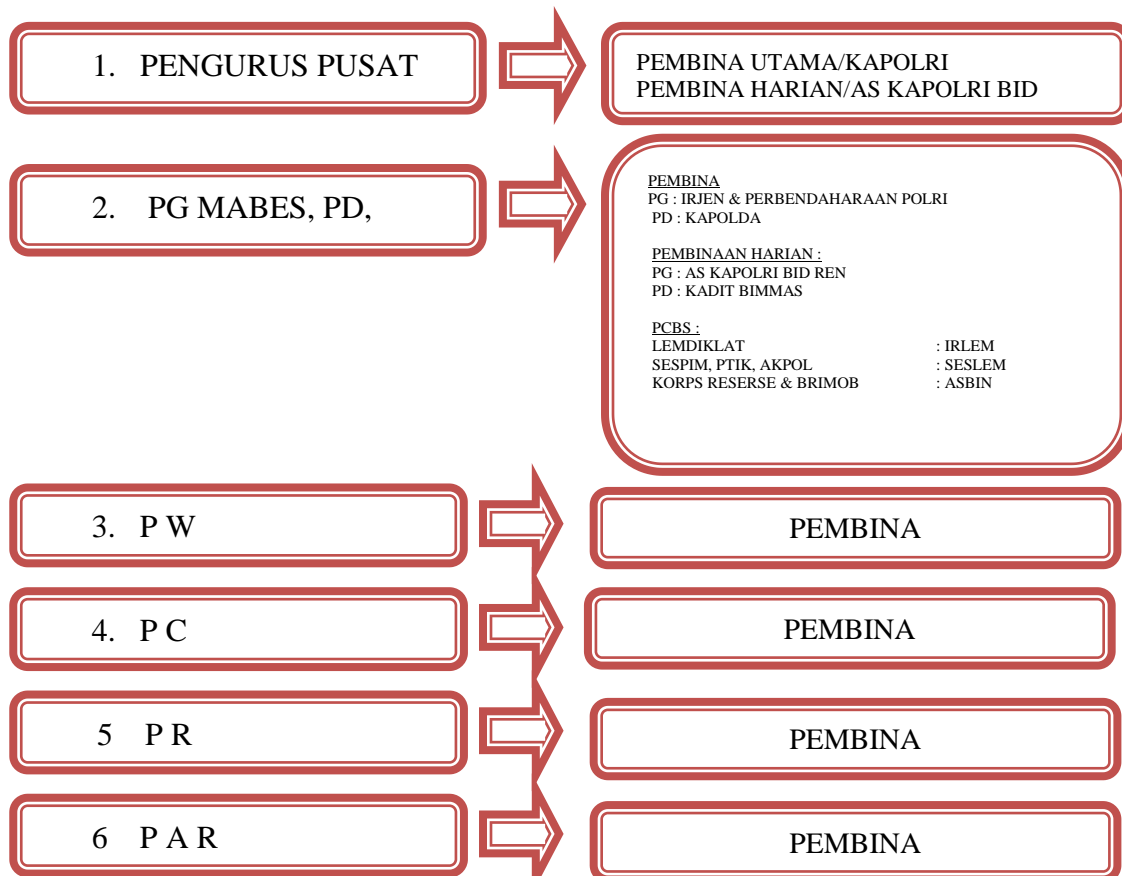
³ KPI singkatan dari Kartu Penunjuk Istri

Mematuhi Aturan Daerah dan Aturan Rumah Tangga, Membayar iuran anggota dan iuran sosial, Memberikan peranan yang positif bagi organisasi, Menghadiri rapat atas undangan pengurus, Mematuhi dan melaksanakan kepengurusan organisasi.

Organisasi pada umumnya juga terdapat bagan kepengurusan yang lebih banyak mengurus berjalannya organisasi tersebut. Juga memimpin berbagai macam kegiatan yang di laksanakan dalam organisasi tersebut. Organisasi Bhayangkari ini terdapat struktur kepemimpinan yang segala sesuatunya dapat dijalankan dengan baik. Di bawah ini merupakan bagan struktur kepemimpinan pada organisasi Bhayangkari.

Skema 2.1

Tingkat Kepengurusan / Pembina⁴



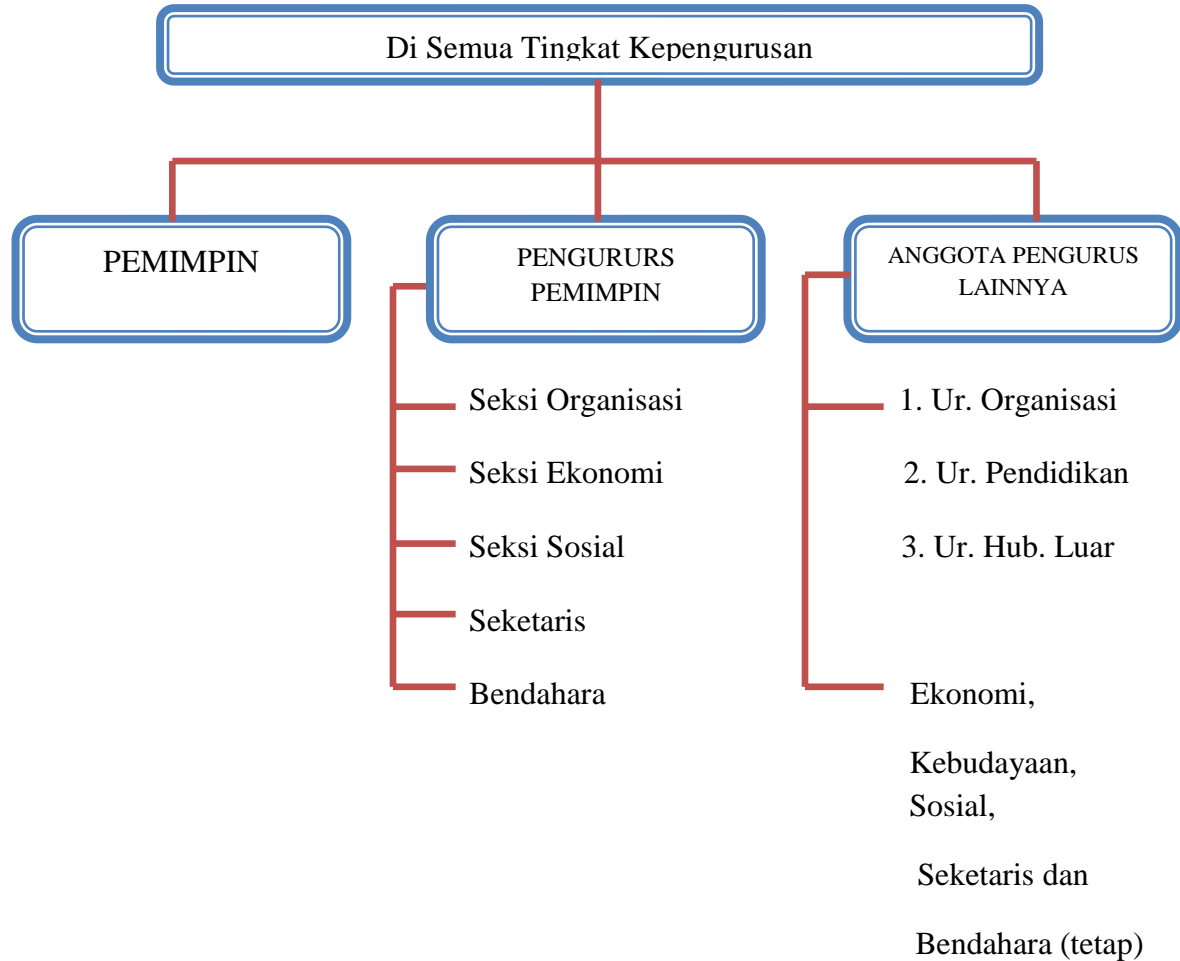
Sumber : buku kerja tahunan 2011

Berjalannya organisasi bukan hanya di atur oleh terciptanya struktur kepemimpinan organisasi, tetapi juga terdapat tata cara kerja Bhayangkari. Berikut bagan dari tata cara kerja Bhayangkari.

⁴ Di kutip dari handout LEMDIKLAT SECAPA BHAYANGKARI, tahun 2000

Skema 2.2

Tata Cara Kerja Bhayangkari



Sumber : handout lemdik secapa, Bhayangkari tahun 2011

Dari bagan 2.2 di atas dapat kita lihat cara organisasi Bhayangkari melakukan kegiatan para anggota memiliki masing-masing peran serta tugas yang harus di laksanakan. Jika kita lihat dari bagan di atas terdapat tiga bagian cabang yang di kembangkan dari berbagai keseluruhan kepengurusan, yaitu pemimpin, pengurus

pemimpin, dan anggota pengurus lainnya. Pemimpin pada cabang pertama merupakan struktur organisasi paling utama yang memegang peran penting dalam banyak hal. Pada cabang yang kedua terdapat Pengurus Pemimpin, terdapat berbagai seksi yang di kembangkan. Seksi yang pertama seksi organisasi, seksi ekonomi, seksi kebudayaan, seksi sosial, sekretaris dan bendahara. Sedangkan cabang yang ketiga, yaitu anggota pengurus lainnya yang juga memiliki ranting yang di sebut sebagai urusan. Urusan yang terdapat pada bagian ini terdapat urusan organisasi, urusan pendidikan, urusan hubungan luar, ranting yang ke dua terdapat ekonomi, kebudayaan, sosial, sekretaris dan bendahara (tetap).

Seperti organisasi-organisasi pada umumnya yang pasti memiliki baju “kebesaran” atau baju seragam yang akan di pakai setiap berkegiatan serta atribut-atribut pendukung lainnya. Adanya seragam kerja yang biasa di pakai berwarna merah muda, bersertakan pin yang menggambarkan lambing Bhayangkari. Atribut-atribut yang menjadi pelengkap identitas organisasi Bhayangkari adalah lambing, panji, vandal, lencana, KTA, pakaian seragam, papan nama kantor, cap, bendera organisasi Bhayangkari, himne dan mars, kenang-kenangan dan tanda penghargaan.

D. Penutup

Organisasi Bhayangkari diputuskan oleh istri-istri anggota Kepolisian dari 27 perwakilan wilayah pada saat itu, untuk bersatu dalam gerakan perjuangan melalui wadah tunggal organisasi.

Dengan adanya tuntutan reformasi, guna ditegakannya supremasi hukum dan Polri Mandiri, yang mengeluarkan aturan bagi Badan Kepolisian. Menikuti perubahan pada Polri, maka Bhayangkari harus menyesuaikan dengan merubah struktur organisasi pengurus pusat Bhayangkari dimana menghapus jabatan Ketua Harian Bhayangkari dan membentuk sekaligus mengangkat wakil ketua umum Bhayangkari.

Organisasi Bhayangkari ini merupakan organisasi formal yang disahkan oleh Badan Kepolisian Republik Indonesia. Yang guna mendukung pekerjaan para suami sebagai anggota Kepolisian Republic Indonesia dan juga secara tidak langsung membantu perekonomian keluarga dengan cara mengasah kemampuan atau keahlian.

Dari terbentuknya Bhayangkari ini terciptalah berbagai macam kegiatan sosial yang membangun dan bermanfaat bagi seluruh anggota dan lingkungan sekitar. Kegiatan yang berlingkup di bidang sosial, pendidikan dan perekonomian.